

## ABSTRAK

**Hermawan, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, PERUBAHAN SIMPANAN WAJIB MENJADI SERTIFIKAT MODAL KOPERASI BERDASARKAN PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN, Herman Suryokumoro, S.H., M.S, Yenny Eta Widayanti, S.H., M.Hum.**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perubahan Simpanan Wajib Menjadi Sertifikat Modal Koperasi Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perubahan yang terjadi didalam regulasi perkoperasian di Indonesia, yakni perubahan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi terkait sistem permodalan koperasi, yang mana didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun didalam regulasi sebelumnya yang pernah berlaku di Indonesia, semuanya hampir sama menggunakan istilah simpanan sebagai permodalan koperasi, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka istilah simpanan berubah menjadi istilah sertifikat modal koperasi sebagai permodalan koperasi. Dalam hal ini istilah sertifikat modal koperasi hampir mirip dengan istilah saham pada Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah perubahan sistem permodalan koperasi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi? (2) Bagaimana kedudukan hukum simpanan wajib bagi koperasi setelah diubah menjadi sertifikat modal koperasi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012? (3) Bagaimana kedudukan hukum simpanan wajib bagi anggota koperasi setelah diubah menjadi sertifikat modal koperasi berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun dan dikumpulkan melalui studi penelitian kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis dan diteliti dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perubahan yang terjadi didalam sistem permodalan koperasi bertentangan dengan filosofi dan prinsip-prinsip koperasi. Karena pada hakekatnya koperasi merupakan perkumpulan orang, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka koperasi berubah menjadi perkumpulan modal. Selain itu, dimana sebelumnya anggota dapat memberikan modal secara sukarela kepada koperasi, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, maka anggota tidak dapat lagi memberikan modal secara sukarela kepada koperasi.

Simpanan wajib bagi koperasi merupakan hutang koperasi terhadap anggotanya. Dalam hal ini koperasi tidak memiliki modal, karena modal yang dimiliki koperasi berasal dari pinjaman anggota. Sedangkan sertifikat modal koperasi bagi koperasi merupakan modal miliki koperasi, yang mana modal koperasi tersebut yang berbentuk sertifikat modal koperasi dibeli oleh anggota pada saat koperasi berdiri.

Simpanan wajib bagi anggota koperasi merupakan pinjaman modal dari anggota kepada koperasi, dalam hal ini simpanan wajib tersebut dapat di ambil kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Sedangkan sertifikat modal koperasi bagi anggota koperasi merupakan saham anggota didalam koperasi, dalam hal ini sertifikat modal koperasi tidak dapat ditarik kembali oleh anggota, ketika anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi, akan tetapi sertifikat modal koperasi tersebut dapat dialihkan kepada anggota koperasi yang lain.



**ABSTRACT**

**Hermawan, bussiness law, Faculty of Law Brawijaya University, August 2013, THE CHANGING OF OBLIGATORY DEPOSIT TO COOPERATION CAPITAL CERTIFICATE BASED ON ARTICLE 66 PARAGRAPH (1) ACT NUMBER 17 YEARS 2012 ABOUT COOPERATION, Herman Suryokumoro, S.H., M.S, Yenny Eta Widjanti, S.H., M.Hum.**

In this paper, the authors raised issues about the changing of obligatory deposit become cooperation capital certificate based on article 66 paragraph (1) Act number 17 years 2012 about cooperation. The choice of theme is motivated by the changes that occur in the regulation of cooperatives in Indonesia, that is the changes of Act number 25 years 1992 become Act number 17 years 2012. One of the most significant changes related with the cooperation capital system, which is in the Act number 25 years 1992 and in the previous regulation which ever applies in Indonesia, all almost same using the deposit term as cooperation capital. but after the issuance of Act number 17 years 2012, so the deposit changed into cooperation capital certificate as cooperation capital. In this case cooperation capital certificate almost similiar that the shares in limited liability companies.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) Is the change of cooperation capital system pursuant to Act No. 17 of 2012 contradict with the cooperation of principles? (2) How the legal position after the obligatory deposit for cooperatives after changed to cooperation capital certificate pursuant to Article 6, paragraph (1) of Act No. 17 of 2012? (3) How the legal position after the obligatory deposit for members cooperative after changed to cooperation capital certificate pursuant to Article 6, paragraph (1) of Act No. 17 of 2012? Then the writing of this paper uses the method of normative legal research whit method statue approach, comparative approach, and comparative approach. Primary legal material, secondary, and tertiary collected through the study of library research, which is then analyzed and investigated using the method of grammatical interpretation gives meaning to a term or word in accordance with the colloquial or legal language.

From the results of research with the above method, authors obtained answer to existing problems that the changes that occur within the cooperative system capital contradict philosophy and the cooperative principles. Because essentially a cooperative is an association of people, but after the issuance of Act Number 17 of 2012, than cooperative changed become capital assosiation. In addition, where previous members may voluntarily provide capital to the cooperative, but after the issuance of Act Number 17 of 2012, the members can't longer provide capital to the cooperative voluntarily.

The obligatory deposit from the members means cooperation debt. In this case cooperative doesn't has capital, the cooperation capital came from member's loan. Whereas the cooperation capital certificate for cooperative is a have cooperative capital, in the which cooperative capital certificate purchased by the cooperative members when standing.

The obligatory deposit is the capital loan from members to cooperative. in this case can be taken back when those members out from the cooperation membership. While cooperation capital certificate from members to cooperative is shares of the cooperative members in the cooperative, in this case cooperation capital certificate can not be withdrawn by the member, when the member in question out of the cooperative membership, but the cooperation capital certificate is transferable to other cooperative members.

